

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1. Ringkasan Hasil Kajian dan Observasi**

Berdasarkan hasil kajian dan observasi selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan penyusunan tugas akhir di Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa prosedur pengeluaran kas pada kegiatan *Event* Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Museum Tingkat Kota Yogyakarta telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi keuangan daerah yang berlaku, yaitu khususnya mengacu pada Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam implementasinya, proses pengeluaran kas tidak dilakukan dengan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersendiri, karena komponen anggaran kegiatan telah tertuang secara langsung dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan Surat Perintah Kerja (SPK). Tahapan utama pengeluaran kas dimulai dari pengajuan Tambahan Uang (TU) oleh PPTK, dilanjutkan dengan verifikasi dan pencairan dana oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), hingga pelaporan pertanggungjawaban melalui dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Pengeluaran kas digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan kegiatan, seperti konsumsi peserta, honorarium juri, sewa peralatan, hingga hadiah lomba. Saat pelaporan pengeluaran kas harus disertai dengan bukti transaksi, kelengkapan administrasi, dan bukti dokumentasi. Ketiga dokumen tersebut berfungsi sebagai bukti tertulis atas penggunaan anggaran dan mendukung prinsip akuntabilitas.

Prosedur pengeluaran kas ini melibatkan banyak pihak, mulai dari Pengguna Anggaran (PA), Bendahara Pengeluaran, PPK, Verifikator, PPTK, BUD, hingga panitia pelaksana kegiatan. Pihak-pihak tersebut memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing untuk memastikan bahwa prosedur pengeluaran kas untuk *Event* Final Lomba Cerdas Cermat Museum Tingkat Kota Yogyakarta berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kerjasama yang baik

antara semua pihak sangat diperlukan untuk mencapai tujuan kegiatan dan menjaga akuntabilitas keuangan.

Selain itu, terdapat juga juri dan peserta lomba, yang secara langsung menjadi bagian penting dalam kegiatan. Juri memiliki peran utama dalam menilai jalannya lomba, memberikan penilaian yang objektif, serta menentukan pemenang berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Sebagai bentuk apresiasi atas keahlian dan tanggung jawab mereka, juri menerima honorarium yang dibayarkan melalui mekanisme pengeluaran kas dan didukung oleh dokumen seperti daftar nominatif dan kuitansi penerimaan. Sementara itu, peserta lomba, yang berasal dari berbagai sekolah tingkat kota, menerima fasilitas berupa konsumsi selama kegiatan, sertifikat partisipasi, dan hadiah bagi para pemenang, yang seluruhnya dibiayai menggunakan anggaran kegiatan dan dicatat dalam laporan pertanggungjawaban.

## **5.2. Pengetahuan dan Wawasan Baru yang Diperoleh**

Selama penyusunan tugas akhir ini, penulis memperoleh berbagai pengetahuan dan wawasan baru melalui proses observasi, pengumpulan data, dan bukti dokumentasi. Hasil ini tidak hanya memperkuat pemahaman teoritis mereka, tetapi juga memberikan pengalaman praktis dalam praktik pengelolaan keuangan sektor publik. Berikut adalah beberapa hal baru yang diketahui dan dipelajari:

### **1. Pemahaman Prosedural dalam Pengeluaran Kas Instansi Pemerintahan**

Melalui proses penyusunan tugas akhir ini, penulis memperoleh pemahaman yang lebih nyata dan menyeluruh mengenai alur dan prosedur pengeluaran kas yang diterapkan pada instansi pemerintah daerah, khususnya pada Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan *Event* Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Museum Tingkat Kota Yogyakarta.

Proses dimulai dari pengajuan Tambahan Uang (TU) oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) melalui sistem SIPD RI. Pengajuan ini disertai dengan dokumen pendukung seperti Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Pernyataan Tanggung Jawab, dan kebutuhan TU yang dirinci. Setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD dan disetujui oleh Bendahara Umum

Daerah (BUD) melalui penerbitan SP2D, dana dicairkan ke rekening Bendahara Pengeluaran dan digunakan untuk membiayai keperluan kegiatan.

Melalui keterlibatan langsung dalam proses tersebut, penulis memperoleh pemahaman bahwa setiap pengeluaran kas di pemerintahan memerlukan dokumen yang sah, prosedur berjenjang yang ketat, serta keterlibatan antarbagian yang saling mendukung. Tidak hanya sebagai praktik administratif, prosedur pengeluaran kas juga mencerminkan bentuk pengendalian internal, transparansi, dan akuntabilitas publik yang harus dijaga.

## 2. Koordinasi dan Komunikasi dalam Struktur Organisasi Pemerintahan

Selama pelaksanaan kegiatan, penulis memperoleh pemahaman yang mendalam bahwa koordinasi dan komunikasi yang efektif antarbagian dalam struktur organisasi pemerintahan menjadi kunci utama dalam kelancaran pelaksanaan prosedur pengeluaran kas. Koordinasi antara semua pihak yang terlibat, sangat menentukan ketepatan waktu dan kesesuaian penggunaan anggaran serta tanpa koordinasi yang baik, proses administratif dan teknis kegiatan berpotensi mengalami hambatan.

Wawasan ini memberikan pemahaman kepada penulis bahwa keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah tidak cukup hanya berlandaskan prosedur yang baik, melainkan juga harus ditopang oleh komunikasi yang aktif, saling memahami tugas dan peran, serta adanya kerja sama antarpihak yang bersifat horizontal maupun vertikal di dalam struktur organisasi. Harmonisasi hubungan kerja ini penting untuk meminimalisir kesalahan administratif dan memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan efisien, tepat waktu, dan sesuai anggaran.

## 3. Etika dan Tanggung Jawab dalam Mengelola Keuangan Publik

Pada bagian ini, penulis memperoleh pengalaman nyata mengenai pentingnya etika, kejujuran, ketelitian, dan rasa tanggung jawab dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan publik, khususnya di lingkungan pemerintahan. Dalam proses pengeluaran kas, setiap transaksi yang

menggunakan anggaran negara harus dilakukan secara transparan, sesuai prosedur, dan dilengkapi dengan bukti yang sah. Penulis menyadari bahwa kelalaian sekecil apa pun, seperti kesalahan nominal dalam kuitansi, tanggal yang tidak sesuai pada bukti pembayaran, atau dokumen yang kurang lengkap, dapat menimbulkan temuan administratif dalam audit. Bahkan dalam situasi tertentu, kekeliruan administratif dapat dianggap sebagai indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran jika tidak segera diklarifikasi atau diperbaiki.

Oleh karena itu, sikap profesional dan integritas moral sangat diperlukan dalam menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan keuangan negara. Pegawai yang menangani keuangan, termasuk PPTK, bendahara, hingga panitia pelaksana, harus mampu bekerja dengan penuh ketelitian, bertanggung jawab terhadap setiap lembar dokumen, serta jujur dalam setiap bentuk pelaporan. Penulis belajar bahwa tanggung jawab dalam akuntansi sektor publik tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga etis, karena berurusan langsung dengan uang negara yang bersumber dari pajak rakyat dan harus digunakan sebaik-baiknya demi kepentingan publik.

Pengalaman ini memberikan pemahaman bahwa profesionalisme dalam pengelolaan keuangan publik tidak hanya diukur dari kemampuan menyusun laporan keuangan yang rapi, tetapi juga dari komitmen untuk menjaga kepercayaan publik melalui praktik yang bersih, transparan, dan akuntabel. Etika kerja ini menjadi nilai penting yang harus dimiliki oleh setiap individu yang terlibat dalam sistem keuangan pemerintahan.

#### 4. Keterkaitan Antara Teori dan Praktik Akuntansi Sektor Publik

Pada pelaksanaan kegiatan dan penyusunan tugas akhir, penulis merasakan secara langsung bahwa materi-materi yang diperoleh selama perkuliahan di bangku D3 Akuntansi, khususnya mata kuliah Akuntansi Sektor Publik, memiliki keterkaitan erat dengan praktik nyata di lapangan. Konsep-konsep teoritis seperti siklus anggaran daerah, mekanisme pengeluaran kas, dokumen pertanggungjawaban, serta asas transparansi dan akuntabilitas, terbukti tidak hanya sebagai bahan

akademik saja, melainkan benar-benar dijalankan dan menjadi dasar operasional dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, penulis juga melihat secara langsung bagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan, seperti dengan penyusunan dokumen lengkap, pencatatan transaksi yang tertib, serta penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPD) sebagai sarana pelaporan digital yang dapat diaudit. Keterlibatan banyak pihak dalam proses pengeluaran kas menunjukkan penerapan teori tentang pengendalian internal dan tanggung jawab fungsional, yang sebelumnya dipelajari dalam kelas sebagai konsep-konsep dasar tata kelola keuangan yang baik.

Melalui pengalaman ini, penulis tidak hanya memahami bahwa teori yang diajarkan di kampus relevan dengan kenyataan, tetapi juga memperoleh bekal praktis yang sangat berguna untuk diterapkan di dunia kerja, terutama dalam bidang akuntansi sektor publik, administrasi keuangan, dan pengelolaan anggaran pemerintahan.

Penulis berharap bahwa penulisan tugas akhir ini tidak hanya menjadi syarat akademik semata, tetapi juga dapat memberikan manfaat praktis dan referensi ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak yang berhubungan dalam pengelolaan keuangan daerah. Semoga kajian ini dapat menjadi tambahan literatur dalam memahami pentingnya prosedur pengeluaran kas yang tertib, transparan, dan akuntabel, serta mendorong perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola keuangan di lingkungan pemerintahan.